



9 772088 235001

OPTIMALISASI DISTRIBUSI CADANGAN BERAS PEMERINTAH

Masyithah Aulia Adhiem*

Abstrak

Beras memegang peranan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan juga inflasi nasional. Ketersediaan beras di pasar dan di tingkat konsumen akan memengaruhi harga beras. Guna menjaga pasokan beras, pemerintah melakukan pendistribusian cadangan beras pemerintah (CBP). Masih banyaknya CBP di gudang Bulog meskipun sudah dilakukan pendistribusian perlu menjadi perhatian bersama agar kualitas stok tetap terjaga. Tantangan yang masih ada antara lain lambatnya penyaluran stok, kendala logistik, dan sinergi antarpihak. Tulisan ini menganalisis alternatif kebijakan untuk meningkatkan optimalisasi distribusi cadangan beras untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga beras nasional. Guna menghadapi tantangan tersebut maka dapat dilakukan peningkatan kapasitas gudang. Untuk mengatasi kendala logistik di lokasi tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maka dapat dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Komisi IV DPR RI berperan memastikan kecukupan anggaran dan penyediaan payung hukum. Dari sisi pengawasan perlu dilakukan kunjungan kerja berkala di gudang-gudang Bulog untuk memastikan rotasi stok berjalan baik dan kualitas CBP terjaga

Pendahuluan

Beras merupakan komoditas strategis yang berperan dalam pencapaian swasembada pangan, selain juga memengaruhi stabilitas perekonomian serta pengendalian inflasi nasional. Guna menjaga stabilitas harga beras, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengandalkan pendistribusian cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perusahaan Umum Bulog (Bulog). Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa hingga 2 November 2025 jumlah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 560 ribu ton (Zuhdi, 2025). Meskipun capaian tersebut relatif tinggi, namun banyak yang harus menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah masih banyaknya CBP yang disimpan di gudang-gudang milik Bulog dan belum didistribusikan. Stok beras yang ada per tanggal 27 Oktober 2025 telah mencapai 3,9 juta ton tersebar di berbagai gudang Bulog. Jumlah tersebut masih sangat banyak dan menjadi perhatian tersendiri bagi Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke salah satu gudang Bulog di Bali. Mutu dan kualitas CBP menjadi perhatian utama agar beras yang didistribusikan dari gudang layak untuk konsumsi masyarakat (Ramalan & Setiawan, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: masyithah.adhiem@dpr.go.id

Dengan sisa waktu 2 bulan hingga akhir tahun 2025, maka diperlukan suatu langkah strategis untuk mengoptimalkan distribusi cadangan beras yang ada di Bulog saat ini. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Tulisan ini menganalisis alternatif kebijakan untuk meningkatkan optimalisasi distribusi cadangan beras untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga beras nasional.

Tantangan Distribusi Cadangan Beras Pemerintah

Fluktuasi harga beras memiliki dampak langsung terhadap inflasi nasional. Hasil catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Oktober 2025 terjadi deflasi harga beras di 23 provinsi. Penurunan harga beras juga terjadi di hampir seluruh rantai perdagangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang meredam terjadinya inflasi di tingkat nasional (Dwih, 2025). Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator dan Bulog sebagai operator, mengelola CBP sebagai instrumen utama untuk meredam gejolak harga beras. Distribusi yang efektif dan efisien membantu upaya meredam kenaikan harga di tingkat konsumen.

Namun beberapa hal masih menjadi tantangan dalam distribusi CBP, antara lain keterlambatan penyaluran, kendala logistik, dan penyelarasan sinergi antarinstansi terkait. Kondisi keterlambatan tersebut disebabkan salah satunya karena pelepasan CBP dari gudang Bulog tidak dapat dilakukan secara mandiri melainkan harus melalui mekanisme rapat koordinasi yang melibatkan beberapa *stakeholder*. Pelepasan dan distribusi CBP oleh Bulog dilakukan berdasarkan data, antara lain data produksi dan kebutuhan konsumsi (Peraturan Bapanas Nomor 12 Tahun 2022). Data tersebut dihasilkan oleh instansi yang berbeda dan dapat terjadi perbedaan data yang menyebabkan distribusi tidak dilaksanakan tepat waktu. Intervensi (seperti Operasi Pasar/SPHP) umumnya dilakukan setelah harga melonjak, bukan sebelum atau saat gejala awal muncul (preventif).

Tantangan lainnya dalam pendistribusian CBP karena kendala logistik, seperti lokasi yang sulit dijangkau (daerah 3T). Hal tersebut sebenarnya sudah diatasi oleh pemerintah dengan melibatkan banyak pihak (*multistakeholder*) dalam distribusi CBP, di antaranya Pegadaian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui lembaga pemasyarakatan (lapas), TNI, Polri, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, pengecer di pasar, dan pemerintah daerah. Distribusi melalui Pegadaian misalnya, dimaksudkan untuk memperluas wilayah jangkauan penyaluran. Adapun di lapas juga nantinya akan menerima beras-beras SPHP (Nordiansyah, 2025; Zuhdi, 2025). Peran pemerintah daerah dalam distribusi CBP juga diterapkan di berbagai daerah. Salah satunya adalah Kota Batu yang berhasil menyalurkan 35 ton beras SPHP yang bersumber dari gudang Bulog regional Malang. Distribusi dilakukan melalui mekanisme Gelar Pangan Murah di tiga kecamatan (Nugroho, 2025). Meski demikian, perlu dilakukan intervensi agar daerah-daerah lain, terutama daerah yang bukan lumbung pangan, mendapatkan manfaat maksimal dari hasil distribusi CBP.



Alternatif Kebijakan Meningkatkan Optimalisasi Distribusi CBP

Langkah kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan optimalisasi adalah melalui peningkatan kapasitas gudang Bulog. Pemerintah telah mengambil langkah dengan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 100 gudang baru milik Bulog, tambahan dari 1.555 gudang yang telah ada. Gudang-gudang tersebut akan dibangun di lokasi lumbung pangan yang belum memiliki fasilitas penyimpanan hasil pertanian dengan kapasitas gudang bervariasi 1.000 hingga 3.500 ton (Harianto, 2025).

Peningkatan kapasitas tidak hanya dari sisi infrastruktur fisik namun juga didukung oleh teknologi digital. Bulog telah mengintegrasikan teknologi digital pada gudang mereka, dari mulai penyusunan fisik beras hingga pemantauan arus keluar-masuk beras. Penghitungan karung beras tidak lagi dilakukan manual melainkan sudah melalui sensor pada pintu gudang (Rizky, 2025). Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan optimalisasi distribusi CBP. Guna meningkatkan efektivitas gudang maka dapat juga dikembangkan kecerdasan buatan (AI) sebagai penunjang akurasi data. Pemanfaatan AI dapat diterapkan untuk menciptakan suatu panel data bersifat *real-time* yang menggunakan data hingga ke level rumah tangga untuk melihat indikasi kekurangan pangan ataupun kenaikan harga. Bulog juga dapat mengembangkan model *AI forecasting* harga dan kebutuhan pangan sebagai dasar utama pengambilan kebijakan pelepasan dan penyaluran cadangan, ekspor, maupun impor beras. Hal ini dimaksudkan agar pelepasan dan distribusi CBP tidak hanya bersifat reaktif ketika sudah terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga, namun juga bersifat preventif.

Pemanfaatan teknologi juga dapat diterapkan untuk menjaga kualitas gabah yang disimpan. Misalnya untuk melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi gabah, mengatur kondisi lingkungan yang paling baik untuk penyimpanan beras, dan memberikan *early warning system* apabila terjadi perubahan kondisi, baik fisik beras maupun lingkungan gudang, yang dapat memengaruhi kualitas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kualitas CBP hingga ke tangan konsumen. Sejalan dengan hal tersebut, arahan oleh Siti Hediati Soeharto selaku pimpinan Komisi IV DPR RI juga menyebutkan bahwa perlu dilakukan rotasi stok maksimal enam bulan untuk memastikan kualitas beras secara nasional (Ramalan & Setiawan, 2025). Bulog perlu terus mengembangkan model penyimpanan stok dinamis untuk menjamin perputaran stok yang dibarengi dengan riset untuk menentukan durasi waktu simpan yang optimal sebagai bagian dari manajemen rantai pasok CBP.

Selain itu, Komisi IV DPR RI dapat mendorong penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, terutama mitra kerja terkait. Pemerintah perlu mempersiapkan mekanisme penguatan bagi Bulog selaku operator agar dapat lebih fleksibel dalam mengelola CBP, terutama terkait mekanisme pelepasan stok. Selama ini kebijakan masih berfokus pada bagaimana Bulog harus sanggup menerima hasil panen petani. Padahal selain itu yang juga harus diperkuat adalah kebijakan untuk pelepasan dan distribusi CBP sehingga tidak terjadi penumpukan stok. Bapanas selaku regulator perlu mengkaji kembali mekanisme rapat koordinasi agar dapat dilaksanakan lebih efektif sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi kebijakan preventif ketimbang bersifat reaktif.



Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga memegang peran penting. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan kebijakan dan pendanaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan CBP dan CBP daerah. Pemerintah daerah dapat didorong untuk membangun gudang penyimpanan stok dan membangun *database* yang menghubungkan antardaerah. *Database* dapat menjadi solusi untuk melihat kelangkaan beras di tingkat daerah sehingga dapat segera ditangani dengan mengirimkan CBP dari daerah lain yang memiliki kelebihan stok. Hal ini khususnya untuk daerah-daerah 3T yang bukan merupakan lumbung pangan. Hal tersebut dapat menjadi pertolongan pertama sebelum adanya intervensi dari pemerintah pusat.

Penutup

Optimalisasi penyaluran cadangan beras di Indonesia merupakan transformasi strategis yang mendesak. Keterlambatan penyaluran, kendala logistik distribusi, dan sinergi kebijakan merupakan tantangan yang masih dihadapi. Pemerintah perlu melakukan peningkatan kapasitas gudang Bulog, baik infrastruktur maupun penguatan secara teknologi. Teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan akurasi data sehingga pengambilan keputusan dapat lebih tepat, efektif, dan efisien. Selain itu juga penting untuk menyelaraskan dan meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan guna menghadapi tantangan logistik, terutama untuk penyaluran CBP ke daerah 3T.

Komisi IV DPR RI memegang peranan penting untuk memastikan upaya optimalisasi distribusi CBP berjalan baik. Dari sisi penganggaran, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai bagi peningkatan kapasitas gudang Bulog. Penguatan terhadap peran Bulog juga dapat didorong melalui pengaturan dalam undang-undang. Selain itu, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat secara berkala mengunjungi gudang-gudang Bulog di berbagai wilayah untuk melihat kondisi dan kesiapan dalam melakukan pelepasan.



Referensi

- Dwinh. (2025, November 4). Deflasi beras tekan inflasi Oktober 2025, Mentan Amran: Bukti sinergi lintas sektor. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/11/04/100655826/deflasi-beras-tekan-inflasi-oktober-2025-mentan-amran-bukti-sinergi-lintas>.
- Harianto, M. (2025, Oktober 13). Bulog dapat tambahan anggaran bangun 100 gudang Rp5 triliun. *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/5171309/bulog-dapat-tambahan-anggaran-bangun-100-gudang-rp5-triliun>.
- Nordiansyah, E. (2025, November 2). Jurus Bulog kebut distribusi beras SPHP. *Metrotvnews.com*. <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCo2Do-jurus-bulog-kebut-distribusi-beras-sphp>
- Nugroho, A. (2025, November 2). 35 ton beras tuntas disalurkan melalui 12 GPM di Kota Batu. *Jawapos.com*. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/816778666/35-ton-beras-tuntas-disalurkan-melalui-12-gpm-di-kota-batu>.
- Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.
- Ramalan, S. & Setiawan, S. R. D. (2025, November 2). Stok beras 3,9 juta ton, Titiek Soeharto ingatkan mutu dan kualitas. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/11/02/181100826/stok-beras-bulog-3-9-juta-ton-titiek-soeharto-ingatkan-mutu-dan-kualitas?page=all>
- Rizky, M. (2025, Oktober 23). Berubah! Bulog kini kelola gudang dari tenaga manusia ke digitalisasi. *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251023102702-4-678520/berubah-bulog-kini-kelola-gudang-dari-tenaga-manusia-ke-digitalisasi>.
- Zuhdi, N. (2025, November 2). Bulog catat penyaluran beras SPHP capai lebih dari 560 ribu ton. *Metrotvnews.com*. <https://www.metrotvnews.com/read/kELCzL0A-bulog-catat-penyaluran-beras-sphp-capai-lebih-dari-560-ribu-ton>

